

Antisipasi Krisis Air Bersih di Jateng

SEMARANG (KR) - Gubernur Jateng Ganjar Pranowo sejak jauh hari telah mengingatkan masyarakat untuk mewaspadai potensi kekeringan dan krisis air bersih di sejumlah daerah. Ia juga sudah menyiapkan skema bantuan air bersih untuk mengantisipasi itu. Setidaknya ada 7,1 juta liter air bersih yang didistribusikan ke daerah-daerah yang mengalami krisis air bersih.

Demikian dikatakan Gubernur Ganjar Pranowo kepada wartawan di Semarang, pekan lalu. Menurut Ganjar, setiap hari Pemrov Jawa Tengah telah mengirim bantuan air bersih ke sejumlah daerah yang kekeringan. Ganjar juga telah menyiapkan petugas dari BPBD, Bupati/Walikota dan instansi terkait lainnya. Diakui di Jateng ada sejumlah daerah yang saat ini kesulitan air bersih. Untuk itu Ganjar minta masyarakat yang mengalami kekeringan agar segera melapor supaya bisa segera mendapat drooping air bersih.

"Saya telah menerima laporan dari teman-teman media kalau di sejumlah daerah di Jawa Tengah mengalami kekurangan air bersih. Sebenarnya masyarakat tinggal lapor saja biar nanti segera kita kirim air bersih, karena memang ada di daerah-daerah tertentu ya kurang air. Kita siapkan, kita minta kawan-kawan untuk selalu me-report secara rutin," tutur Ganjar Pranowo.

Ganjar menjelaskan, berdasarkan data akumulasi kebutuhan air bersih di kabupaten/kota, bantuan air bersih yang sudah didistribusikan ada sekitar 7,1 liter yang bersumber dari banyak pihak. Distribusinya di semua daerah. Ada sejumlah desa yang memang total terdampak kekeringan. Kabupaten Blora tertinggi, kemudian ada Grobogan.

Melihat kondisi kekeringan saat ini, menurut Gubernur, antisipasi jangka panjang sangat diperlukan untuk memenuhi kebutuhan air bersih. Pertama adalah menjaga dan merawat sumber-sumber mata air dengan memperbanyak menanam pohon. Kedua, pengelolaan sumber mata air juga harus dilakukan dengan membuat saluran agar distribusinya mudah. **(Bdi)-f**

Bupati Boyolali Resmikan Gedung Baru UBY

BOYOLALI (KR) - Gedung baru perkuliahan Program Studi (Prodi) Ilmu Hukum, Teknik Informatika dan Ilmu Komunikasi Universitas Negeri Boyolali (UBY) diresmikan oleh Bupati Boyolali M Said Hidayat, Senin (21/8). Rektor UBY Nanik Sutarni menjelaskan, gedung baru yang diresmikan oleh Bupati Said akan dipergunakan sebagai gedung perkuliahan bagi program studi (prodi) ilmu hukum, teknik informatika dan ilmu komunikasi. Ia mengatakan, dengan adanya gedung dua lantai seluas 2.000 meter ini, akan dapat menambah ruang kelas bagi 1.300 mahasiswanya yang tadinya kekurangan ruang untuk perkuliahan. Terdapat tujuh prodi di perguruan tinggi tersebut, yaitu ilmu hukum, komunikasi, teknik informatika, akuntansi, manajemen, pertanian dan peternakan.

"Kontribusi dari akademisi Universitas Boyolali untuk masyarakat dalam menaikkan sumber daya manusia akan kita tingkatkan, dengan adanya dukungan dari seluruh stakeholder yang ada di Kabupaten Boyolali insyaAllah kita optimis kita akan maju bersama-sama untuk masyarakat Boyolali," ujarnya. Sementara itu, Bupati Boyolali M. Said Hidayat mengungkapkan rasa syukurnya dengan pembangunan gedung baru UBY.

Pihaknya berharap, UBY akan lebih berkembang dan lebih maju lagi kedepannya, sehingga masyarakat dapat mengenyam pendidikan perguruan tinggi tidak jauh dari rumahnya. "Harapan kita dapat segera nantinya dimanfaatkan sebaik-baiknya dan memberikan kemanfaatan seluas-luasnya untuk pengembangan dunia pendidikan di Kabupaten Boyolali," ungkapnya. **(Mul)-f**

Bantuan Perikanan dan Peternakan Tangani Stunting



KR-Zaini Arrosyid

Forhati Jateng menyalurkan bantuan perikanan dan peternakan untuk pengentasan stunting.

MAGELANG (KR) - Majelis Wilayah Forum Alumni HMI Wati (Forhati) Jawa Tengah dan Majelis Daerah Korps Alumni HMI Magelang raya menyalurkan bantuan untuk budidaya perikanan dan peternakan di lereng Gunung Merapi wilayah Kabupaten Magelang, untuk penanganan stunting, Senin (21/8).

Kabid Pendidikan, Keagamaan Dan Sosbud Forhati Jawa Tengah Eny Rahmawati, M. Pd mengatakan bantuan yang disalurkan untuk sektor perikanan berupa benih lele sedangkan sektor peternakan berupa domba. "Bantuan ini sebagai wujud pemberdayaan ekonomi masyarakat terutama pada keluarga kurang beruntung, dan mencegah stunting," kata Eny Rahmawati, di sela penyaluran bantuan.

Penyaluran pada Senin tersebut dilakukan di Dusun Pagerjurang Desa Pagersari, Kecamatan Mungkid, Magelang, dengan sasaran sejumlah warga. Mereka selama ini menjadi desa binaan dari Muaf Center Indonesia. Dikatakan, bantuan perikanan tersebut berupa benih lele, berikut kolam terpal bulat dan pakan pelet hingga panen. Sedangkan untuk peternakan berupa domba. "Bantuan ini diharapkan mampu menambah pendapatan perekonomian keluarga yang berdampak pada peningkatan kesejahteraan keluarga," katanya.

Eny Rahmawati menyampaikan Forhati Jateng bekerja sama dengan KAHMI di sejumlah kabupaten dalam penyaluran bantuan. Mereka diantara Kabupaten Temanggung, Solo, Magelang Semarang dan Kendal. "Temak yang disalurkan telah puluhan, termasuk bantuan untuk perikanan," katanya. Dikemukakan untuk bantuan perikanan bisa menjadi salah satu sumber protein keluarga terutama bagi mereka yang masih memiliki anak balita, sehingga terbebas dari stunting. Forhati juga berjuang untuk penanganan atau pembebasan stunting, diantaranya melalui bantuan perikanan. Ikan yang dipelihara sebagian bisa dikonsumsi selain dijual yang hasilnya untuk modal memelihara ikan sedangkan keuntungannya untuk pendapatan keluarga. **(Osy)-f**

Ganjar Dinilai Berhasil Sejahterakan Guru



KR-Budiono

Ganjar Pranowo saat menerima Dirjen Guru dan Tenaga Kependidikan, Kemenristekdikti Prof Nunuk Suryani.

SEMARANG (KR) - Dirjen Guru dan Tenaga Kependidikan, Kemenristekdikti Prof Nunuk Suryani mengatakan, komitmen Gubernur Jateng Ganjar Pranowo di dunia Pendidikan, telah berhasil meningkatkan kesejahteraan para guru, dengan meningkatkan upah sesuai UMR. Ganjar juga mengupayakan pengangkatan guru honorer menjadi ASN Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K).

Hal itu disampaikan Prof Nunuk Suryani kepada wartawan usai bertemu Ganjar Pranowo di rumah di-

nas Gubernur di Semarang Senin (21/8). Pada pertemuan tersebut dibahas tiga hal antara lain yang terkait dengan pengangkatan ASN P3K. Nunuk mengatakan ada pencocokan data antara data Kemenristekdikti dengan data Pemrov Jawa Tengah, diantaranya terkait jumlah usulan ASN P3K yang masih bisa ditambah untuk memenuhi kebutuhan. "Kita diberi tugas dalam dua hari ke depan untuk menghitung kembali sesuai dengan syarat ketentuan yang disampaikan oleh Pak Gubernur," katanya.

Menurut Nunuk, tugas untuk menghitung kembali jumlah usulan ASN P2K seperti yang diminta Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, masih mungkin untuk dilakukan meskipun secara tahapan pengangkatan ASN P3K sudah ditutup, yaitu dengan Ganjar bersurat ke KemenPAN-RB setelah penghitungan kembali dilakukan. "Itu pernah terjadi. Yang penting, setelah nantinya dilakukan penghitungan, Gubernur harus segera mengirim surat ke sekarang setelah dihitung, Gubernur harus mengirim surat ke KemenPAN, kalau ternyata kebutuhannya mau dikoreksi. Untuk itu kami akan bantu untuk membantu KemenPAN-nya," tutur Nunuk.

Ganjar Pranowo kepada wartawan mengatakan pihaknya mendorong agar pemenuhan kuota bisa diselesaikan tahun ini. Tujuannya, agar kesejahteraan guru di Jateng semakin meningkat. "Tadi disampaikan, karena anggaran dari pusat ada permintaan ditambah, tentu kami senang. Malah kalau bisa diangkat semua, para guru-guru ini," ujarnya.

Ganjar berharap, penghitungan penempatan ASN P3K dilakukan dengan benar agar nantinya pengangkatan tidak muspro dan justru

menimbulkan masalah di kemudian hari. Untuk itu harus ada kepastian kalau tahun depan mesti diangkat. Kalau semua posisi dari guru betul-betul penuh bisa dilengkap, maka kebutuhan guru bisa lebih memadai. Ganjar juga mengusulkan agar Kemenristekdikti mempertimbangkan usulan agar gaji guru ditingkatkan, karena dengan begitu akan semakin lebih banyak masyarakat yang berminat menjadi guru. Jadi tidak hanya sekadar mengangkat P3K saja.

Ganjar berharap, menghadapi bonus demografi dalam 13 tahun ke depan pemerintah lebih fokus memperhatikan dunia Pendidikan, terutama secara sistem yang saat ini sudah berjalan dengan baik. Berdasarkan data Disdikbud Jateng, terdapat guru PNS sesuai kewenangan Pemrov Jateng sebanyak 18.450 orang, guru PPPK 9.361 orang, dan GTT 6.030 orang. Sedangkan kekurangan guru berdasarkan mata pelajaran sebanyak 9.286 orang, jika dikurangi dengan PPPK 2022 sejumlah 4.351 orang (terdiri dari 2.952 orang GTT dan 1.244 guru swasta), sehingga kekurangan guru di Jawa Tengah masih sebanyak 4.935 orang. **(Bdi)-f**

Bawaslu Purworejo Awasi Tahapan Pemilu

PURWOREJO (KR) - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Purworejo masa jabatan 2023-2028 dilantik. Usai pengambilan sumpah dan janji, mereka langsung terjun untuk mengawasi jalannya tahapan Pemilu 2024. Bawaslu RI melantik Purnomosidi, Rinto Hariyadi, Dumadi Tri Restyanto, Widya Astuti, dan Siti Daingatus Solikhah di Jakarta, Minggu (20/8). Setelah itu, mereka berlima melakukan pleno perdana dan menyetujui Purnomosidi sebagai Ketua Bawaslu Purworejo.

Ketua Bawaslu Purworejo Purnomosidi mengatakan, lembaganya akan langsung bergerak cepat untuk mengawasi Pemilu 2024. "Tahapan pemilu sudah berjalan dan tentunya pengawasan melekat harus dilakukan," ungkapnya Senin (21/8). Menurutnya, intensitas ta-

hapan pemilu serentak akan terus meningkat hingga puncaknya pada hari pemungutan suara. Saat ini, tahapan pemilu memasuki pengumuman daftar calon sementara (DCS) bakal calon legislatif yang bersamaan dengan pemutakhiran daftar pemilih dengan pendataan

daftar pemilih tambahan (DPTb) dan daftar pemilih khusus (DPK).

Kemudian, KPU akan mengumumkan Daftar Calon Tetap (DCT) calon anggota legislatif pada 3 November 2023, dilanjutkan kampanye 28 November 2023, masa tenang 11-13 Februari 2024, pemungutan suara 14 Februari 2024, rekapitulasi dan perhitungan suara, penetapan hasil pemilu, serta pengambilan sumpah dan janji calon terpilih.

Selain menyetujui Purnomosidi sebagai ketua, rapat pleno juga menentukan para koordinator divisi. Rinto Hariyadi dipercaya sebagai Koordinator Divisi (Kordiv) Penanganan Pelanggaran dan Data Informasi sekaligus Wakil Kordiv Hu-

kum dan Penyelesaian Sengketa.

Siti Daingatus Solikhah sebagai Kordiv SDM, Organisasi, dan Diklat sekaligus Wakil Kordiv Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Humas.

Kordiv Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Humas dijabat oleh Widya Astuti, yang sekaligus Wakil Kordiv SDM, Organisasi, dan Diklat. Kordiv Hukum dan Penyelesaian Sengketa dijabat oleh Dumadi Tri Restyanto, yang sekaligus Wakil Kordiv Penanganan Pelanggaran dan Data Informasi. Selain itu, kelima anggota Bawaslu Purworejo juga sudah menyetujui pembagian koordinator wilayah dalam menjalankan tugas pengawasan dan pencegahan pelanggaran. **(Jas)-f**

TIDAK MUDAH KELOLA DAN BANGUN MASYARAKAT

Ada Beberapa Masalah Jalankan Fungsi BPD

MAGELANG (KR) - Mengelola dan membangun masyarakat tidak mudah. Dalam menjalankan fungsi-fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD), ada beberapa permasalahan, diantaranya dinamika komunikasi antara BPD dengan pemerintah desa serta BPD dengan lembaga desa, atau sebaliknya. Komunikasi ini harus ditingkatkan.

Demikian disampaikan Bupati Magelang Zaenal Arifin SIP saat berbicara di forum pembinaan peningkatan kapasitas anggota BPD Kabupaten Magelang yang dilaksanakan di Grand Artos Hotel & Convention Magelang, Senin (21/8) sore. Istri Bupati Magelang dan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dispermades) Kabupaten Magelang Gunawan Yudi Nugroho SSTP MM maupun lainnya juga hadir dalam kegiatan ini.

Juga dikatakan, meningkatkan komunikasi menjadi penting, kare-

na fungsi strategis BPD untuk terus turut berpartisipasi dalam kelancaran penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, sehingga saling bersinergi antar lembaga desa. Demikian juga dinamika komunikasi antara Kepala Desa dan Perangkat Desa.

Persoalan lainnya tentang akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan, maka meningkatkan kepekaan akan responsible salah satu tugas BPD dalam mengawasi jalannya RABdes yang bertujuan meminimalisir penyelewengan dana dan meningkatkan keakuratan dalam penggunaan dana desa untuk masyarakat serta pemerintahan desa.

Juga persoalan dalam pengelolaan aset desa. Sebagai anggota BPD perlu adanya pengawasan pada pengelolaan aset desa. Laporan mengenai aset desa ini harus selalu dipantau dan dijaga karena berkaitan dengan sertifikasi yang belum terdaftar sehingga memini-



KR-Thoha

Bupati Magelang bersama istri, Kepala Dispermades Kabupaten Magelang dengan sebagian peserta pembinaan.

malisir terjadinya sengketa.

Yang lainnya adalah tuntutan peningkatan pelayanan desa. Masyarakat memiliki hak untuk memperoleh pelayanan desa, dari administrasi dokumen maupun urusan lainnya, yang perlu diselesaikan melalui pemerintahan desa. Juga tuntutan masyarakat akan kedisiplinan Perangkat Desa terkait jam kerja.

Dikatakan juga, pengawasan finansial terhadap APBN maupun

APBD, dan peningkatan pendapatan desa melalui BUMdes dan BUMdesma menjadi penting. Namun sebagian besar yang belum memberikan dampak signifikan kesejahteraan yang diharapkan berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kesemua permasalahan yang ada, menuntut semua untuk terus berkembang dalam menjalankan roda pemerintahan desa yang stabil dan sejahtera. **(Tha)-f**

Jati Diri Pendamping Desa Perlu Diperkuat

SEMARANG (KR) - Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT), Abdul Halim Iskandar menyatakan jati diri pendamping desa perlu diperkuat. Sehingga mendukung integritas, kapabilitas, elektabilitas dan kapasitas dalam mengurus dana desa.

"Pendamping desa juga perlu diperkuat jati diri yang sebenarnya, karena menciptakan pendamping yang memiliki integritas bukanlah hal yang mudah," kata menteri yang akrab disapa Gus Halim saat memberi pengarahan dalam Refreshment Training Penguatan Pegiat Desa program P3PD angkatan 2 Provinsi Jateng-DIY di Semarang, Minggu (20/8). Gus Halim menilai saat ini yang paling dibutuhkan dalam diri pendamping de-

sa adalah integritas, kapabilitas, elektabilitas dan kapasitas.

Pendamping desa yang ideal harus berintegritas, kepribadian bagus, serta kapabilitas bagus yaitu menguasai dana desa hingga musyawarah desa. Jika telah menguasai tugasnya dengan baik, maka pen-

damping desa populer hingga memiliki elektabilitas.



KR-Istimewa

Gus Halim memberikan pengarahan pada peserta training penguatan pegiat desa.

Menurut mantan Ketua DPRD Jatim ini, yang sulit adalah jati diri pendamping desa, yaitu mengenai pema-haman diri sendiri.

"Sehingga perlu diperkuat jati dirinya. Ini akan membuat pendamping desa memahami diri dan bisa menempatkan diri, serta ujungnya pendamping desa memang dibutuhkan," ungkapnya. Gus Halim menambahkan, saat ini sedang dipikirkan instrumen untuk menjawab pertanyaan dasar yaitu apakah pendamping desa masih dibutuhkan jika telah masuk kategori mandiri.

Desa mandiri yang digarap mengenai persoalan pertumbuhan ekonomi dan peningkatan sumber daya manusia (SDM) Desa. Oleh karena itu, desa mandiri akan semakin membutuhkan keberadaan pendamp-

ping desa. Gus Halim menegaskan bahwa pendamping desa tetap menjadi aset penting bagi desa, bahkan ketika telah mencapai status desa mandiri. Semakin besar alokasi dana desa dan semakin tinggi Indeks Desa Membangun, maka peran pendamping desa dalam mengelola program-program yang berdampak langsung pada masyarakat sangat menentukan.

Oleh karena itu, pendamping desa harus berfokus pada dua kunci penggunaan dana desa, yaitu pertumbuhan ekonomi dan pengembangan sumber daya manusia (SDM). Gus Halim menjelaskan, pada Maret atau April 2024 mendatang Kemendes PDTT akan melakukan survei persepsi masyarakat terkait pemahaman dan manfaat kebijakan dana desa. **(Ati)-f**